



MENJAGA PERSEPSI RISIKO MASYARAKAT MELALUI KOMUNIKASI RISIKO YANG EFEKTIF PADA MASA PANDEMI COVID-19



RANGKUMAN EKSEKUTIF

Jumlah kasus positif penyakit koronavirus 2019 (COVID-19) di Indonesia yang terus meningkat menunjukkan bahwa pandemi masih jauh dari berakhir. Berbagai upaya telah dilakukan, tetapi sebagian upaya tersebut belum berhasil dalam mengendalikan pandemi ini. Beredarnya berita palsu (*hoax*) dan takselarasnya kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 menimbulkan kebingungan masyarakat dalam menyikapi situasi pandemi. Sebagai akibatnya, persepsi masyarakat terhadap risiko penularan COVID-19 berubah-ubah sehingga memicu munculnya rasa aman semu.

Munculnya rasa aman semu yang berujung pada meningkatnya perilaku berisiko dan takkonsistennya adaptasi masyarakat dengan protokol kesehatan menunjukkan adanya permasalahan pada strategi komunikasi risiko selama pandemi COVID-19. Untuk memperkecil risiko penularan COVID-19 dan mengurangi rasa aman semu, serta membangun perilaku adaptif masyarakat yang berkelanjutan dan konsisten, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah berikut.

- Pertama, memperbaiki dan menguatkan strategi komunikasi risiko penularan COVID-19 dengan mengedepankan prinsip keterbukaan informasi
- Kedua, mendukung perubahan perilaku adaptif masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan secara konsisten dan berkelanjutan
- Ketiga, memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengomunikasikan risiko penularan COVID-19 dan memastikan perilaku adaptif masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan
- Keempat, membangun sistem pemantauan dan evaluasi berkala terhadap strategi komunikasi penanganan pandemi COVID-19 dan efektivitasnya

LAJU KASUS COVID-19 DAN ANGKA KEMATIAN YANG MENINGKAT

Pandemi COVID-19 telah membawa banyak korban, baik korban jiwa maupun korban dirawat dengan konfirmasi positif atau dugaan terinfeksi COVID-19, yang jumlahnya terus bertambah. Berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 per 11 November 2020, terdapat 448.118 kasus terkonfirmasi dan 14.836 korban meninggal. Data Worldometers per 11 November 2020 menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat pertama se-Asia Tenggara sebagai negara dengan jumlah kasus terkonfirmasi terbanyak. Data Satgas Penanganan COVID-19 juga menunjukkan bahwa Indonesia pertama kali mencatat penambahan angka kasus baru harian di atas 4.000 pada 19 September 2020 (4.168 kasus). Walaupun jumlah pasien sembuh makin banyak, penularan dalam masyarakat yang terus terjadi dapat mengancam ketahanan sistem kesehatan.

PANDEMI COVID-19 DAN DAMPAK SOSIAL-EKONOMINYA

Pandemi COVID-19 memiliki dampak sosial-ekonomi yang besar. Tingkat kemiskinan pada 2020 diprediksi akan mencapai 12,4% atau akan ada 8,5 juta orang miskin baru akibat pandemi COVID-19 (Suryahadi, Al Izzati, dan Suryadarma, 2020). Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 mencapai 9,78% (26,42 juta orang) atau meningkat sebesar 0,56% dibandingkan dengan September 2019 (Badan Pusat Statistik, 2020a). Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2020 juga mengalami kontraksi sebesar 3,49% terhadap kuartal III 2019 (Badan Pusat Statistik, 2020b). Tingkat pengangguran terbuka pun meningkat menjadi 6,19%–6,69% hingga akhir Maret 2020. Persentase ini setara dengan jumlah pengurangan penyerapan tenaga kerja yang mencapai 1,6 juta hingga 2,3 juta orang (Rahman *et al.*, 2020).

Di sisi lain, tekanan ekonomi dan ancaman kesehatan akibat pandemi COVID-19 telah menumbuhkan solidaritas sosial dalam masyarakat. Di berbagai daerah, masyarakat secara aktif menggalang bantuan barang dan uang untuk warga yang kehilangan pekerjaan atau pendapatannya berkurang akibat pandemi COVID-19 serta warga yang berisiko tinggi terkena COVID-19 (Gambar 1). Namun, pandemi yang berkepanjangan dapat mengancam kohesi sosial dan pada gilirannya akan berdampak pada ketangguhan sosial-ekonomi masyarakat.

PERSEPSI RISIKO YANG RENDAH DAN ADAPTASI YANG TIDAK KONSISTEN: TANTANGAN BESAR DALAM MENANGANI PANDEMI COVID-19

Di tengah bertambahnya jumlah kasus positif dan kematian, sebagian masyarakat terjebak dalam rasa aman semu. Hal ini terlihat dari fakta bahwa masyarakat sudah mulai bekerja, berkegiatan sosial, beribadah di tempat ibadah, dan bahkan berwisata seperti sebelum pandemi. Jika terus dibiarkan, hal ini dapat meningkatkan risiko penularan dan memperluas penyebaran COVID-19.

Peningkatan rasa aman semu dalam masyarakat dipengaruhi oleh setidaknya tiga faktor. Faktor pertama adalah beragamnya persepsi masyarakat terhadap risiko penularan COVID-19. Keragaman tersebut dipengaruhi oleh konteks sosial-budaya dalam masyarakat serta respons kebijakan dan penanganan COVID-19 dari pemerintah. Persepsi masyarakat terhadap risiko



Gambar 1. Pemberian bantuan bahan makanan kepada warga terdampak pandemi COVID-19

cenderung rendah dan berubah-ubah seiring dengan berubahnya pertimbangan risiko kesehatan dan ekonomi, serta berubahnya keputusan dan kebijakan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah (pemda) dalam menangani pandemi (Fillaili, 2020).

Faktor kedua adalah penerapan adaptasi, baik di tingkat individu maupun masyarakat, yang bersifat sementara. Pemahaman risiko yang masih rendah, rasa bosan, dan tekanan ekonomi membuat masyarakat makin abai dari protokol kesehatan. Strategi adaptasi di tingkat individu dan masyarakat juga tidak konsisten. Ketakonsistenan ini menimbulkan kebingungan yang menyebabkan penurunan tingkat kepatuhan masyarakat dan peningkatan risiko penularan COVID-19 (Tamyis, 2020).

Faktor ketiga adalah ketakselarasan kebijakan pemerintah. Untuk membatasi pergerakan orang dan barang, pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun, pelaksanaan PSBB ini diwarnai dengan ketakselarasan kebijakan akibat perbedaan kepentingan antara Pemerintah Pusat dan pemda, serta antarpemda. Skenario kebijakan PSBB yang bertumpu pada daerah membuat pemda bermain dengan iramanya sendiri-sendiri. Sementara itu, di wilayah Jabodetabek, efektivitas pelaksanaan PSBB dihadapkan pada taksinkronnya kebijakan pemda dengan kebijakan beberapa kementerian (Kurniawan, 2020). Situasi-situasi tersebut pada akhirnya membuat pemahaman masyarakat mengenai risiko dan penanganan pandemi COVID-19 tidak utuh sehingga menimbulkan kebingungan dalam masyarakat.

UPAYA KOMPREHENSIF UNTUK MEMBANGUN STRATEGI KOMUNIKASI YANG EFEKTIF AGAR PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP RISIKO PENULARAN COVID-19 TETAP TINGGI DAN STRATEGI ADAPTASI MEREKA BERKELANJUTAN

Untuk memperkecil risiko penularan COVID-19, mengurangi rasa aman semu, dan membangun sikap adaptif yang berkelanjutan dalam masyarakat, diperlukan upaya simultan dan partisipasi

aktif masyarakat. Catatan kebijakan ini mengusulkan empat rekomendasi berikut.

Rekomendasi 1. Memperbaiki dan Menguatkan Strategi Komunikasi Mengenai Risiko Penularan COVID-19 dengan Mengedepankan Prinsip Keterbukaan Informasi

Pemerintah Pusat, pemda, organisasi nonpemerintah (ornop), dan organisasi profesi kesehatan perlu bekerja sama untuk memperbaiki dan menguatkan strategi komunikasi risiko penularan COVID-19. Untuk menjaga agar persepsi masyarakat terhadap risiko penularan COVID-19 tetap tinggi dan benar, Pemerintah Pusat dan pemda tetap perlu menyampaikan informasi terkini secara terbuka dan konsisten mengenai jumlah kasus positif, penambahan jumlah kasus, dan jumlah korban meninggal akibat COVID-19 di suatu wilayah.

Dalam upaya meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kepatuhan masyarakat, informasi mengenai jalur dan potensi penularan COVID-19 juga perlu disampaikan secara terbuka. Penyampaian informasi ini perlu disertai panduan mengenai apa yang harus dilakukan masyarakat jika mengetahui bahwa di lingkungan terdekatnya terdapat kasus positif COVID-19.

Panduan strategi komunikasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah beserta lembaga/jajaran terkait perlu disebarluaskan. Pemerintah Pusat telah menyediakan protokol komunikasi publik tentang penanganan COVID-19 yang diadopsi dari protokol Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Protokol yang disusun Pemerintah Pusat ini perlu mencakup pengaturan kegiatan komunikasi yang harus dilakukan pemda. Pemda perlu melengkapi panduan tersebut dengan strategi yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi daerah dan konteks sosial-budaya dalam masyarakat di wilayahnya. Ornop dan organisasi profesi kesehatan, misalnya, dapat berperan sebagai penyedia data dan analisis tentang kondisi masyarakat yang dapat digunakan sebagai bahan pembuatan panduan oleh pemda. Pesan mengenai pencegahan penularan COVID-19 yang hendak disampaikan kepada masyarakat harus jelas, tidak saling bertentangan, tidak multitafsir, dan sekaligus mampu meluruskan berita bohong yang beredar.

Komunikasi risiko penularan COVID-19 perlu disesuaikan dengan konteks masyarakat, baik menurut wilayah (perdesaan-perkotaan) maupun sektor mata pencaharian (formal-informal). Strategi komunikasi yang digunakan juga harus menyentuh secara langsung kelompok masyarakat miskin dan rentan, serta kelompok yang berisiko tinggi terpapar COVID-19. Pemerintah Pusat, pemda, ornop, dan organisasi profesi kesehatan dapat menggunakan berbagai media komunikasi, seperti media elektronik (televisi dan radio); media daring—termasuk media sosial (akun resmi lembaga terkait); media cetak; serta jejaring komunikasi dalam perkumpulan/komunitas masyarakat. Efektivitas strategi komunikasi perlu dipantau secara berkala untuk memastikan agar informasi mengenai COVID-19, seperti jumlah kasus, penyebaran, danantisipasi penularannya, dapat menjangkau semua kelompok masyarakat serta dapat menjadi panduan perilaku bagi mereka.

Rekomendasi 2. Mendukung Perubahan Perilaku Adaptif Masyarakat dalam Melaksanakan Protokol Kesehatan secara Konsisten dan Berkelanjutan

Pelaksanaan protokol kesehatan perlu dilakukan oleh masyarakat, tanpa kecuali, dalam semua aspek kehidupan.

Oleh karena itu, pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat penting untuk dilakukan. Beberapa strategi dapat dilakukan untuk mendukung perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat.

Strategi pertama adalah pemanfaatan media komunikasi yang paling banyak digunakan masyarakat untuk menyosialisasikan berbagai pesan strategi adaptasi dan menumbuhkan kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19. Penggunaan media tradisional, seperti jejaring komunikasi yang melibatkan perangkat desa/kelurahan, tokoh masyarakat/komunitas/perkumpulan, pemuka agama, rukun tetangga (RT)/rukun warga (RW), dan kader kesehatan, merupakan alternatif untuk menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap media komunikasi berbasis teknologi atau lebih memercayai aktor tertentu sebagai sumber informasi.

Strategi kedua adalah pelibatan semua pihak untuk mengambil peran dalam sosialisasi pesan strategi adaptasi. Pemerintah Pusat dan pemda harus mengambil peran sebagai sumber informasi tepercaya—informasinya didasarkan pada pendapat para ahli, berbasis bukti, jujur, dan terbuka. Pemerintah perlu menyampaikan latar belakang kondisi darurat yang saat ini terjadi dan mengoreksi berita bohong yang beredar. Pengelola media komunikasi, termasuk para aktor pada perkumpulan/komunitas masyarakat, perlu berperan aktif untuk menyebarkan informasi yang kebenarannya terverifikasi. Masyarakat juga perlu bersikap kritis dengan memeriksa kebenaran informasi yang diperoleh dan hanya menyebarkan informasi yang benar.

Strategi ketiga adalah pengawasan yang menyeluruh terhadap penerapan protokol kesehatan, baik di lingkungan tempat tinggal, lingkungan kerja/usaha, maupun fasilitas layanan umum. Pengawasan tersebut tidak hanya melibatkan unsur pemerintah tetapi juga masyarakat dan individu. Agar upaya pelibatan ini berhasil, sistem pengawasan berbasis perkumpulan/komunitas masyarakat perlu dibangun. Aktor pada perkumpulan/komunitas masyarakat dapat ditunjuk sebagai anggota komite yang memastikan berjalannya sistem, sementara tanggung jawab pengawasan dijalankan bersama. Perlu dibangun kesadaran bahwa penerapan protokol kesehatan adalah kunci untuk keselamatan bersama. Oleh karena itu, kewaspadaan dan kedisiplinan adalah tanggung jawab bersama. Sistem pengawasan tersebut perlu mencakup sanksi (hukuman) bagi pelanggar protokol kesehatan. Sanksi yang akan diterapkan perlu ditetapkan bersama, diatur secara terbuka, serta didesain agar bisa menumbuhkan rasa takut melanggar dan memberikan efek jera bagi pelanggar.

Rekomendasi 3. Memperkuat Partisipasi Masyarakat untuk Mengomunikasikan Risiko Penularan COVID-19 dan Memastikan Perilaku Adaptif Masyarakat dalam Melaksanakan Protokol Kesehatan

Penguatan partisipasi masyarakat mencakup penguatan peran lembaga RT/RW dan aktor pada berbagai perkumpulan/komunitas (agama, ekonomi, dan sosial) dalam masyarakat. Mereka akan menjadi ujung tombak upaya menyadarkan anggota masyarakat, meningkatkan pemahaman mereka, dan menjaga keberlangsungan strategi adaptasi melalui pemberdayaan dan pengawasan.

Partisipasi aktif anggota masyarakat menjadi prasyarat utama terciptanya masyarakat yang adaptif terhadap pandemi,



THE SMERU RESEARCH INSTITUTE

Penulis:

Rizki Fillaili dan Ana Rosidha Tamyis

Editor:

Dhania Putri Sarahtika dan Wiwin Purbaningrum

Desain dan Tata Letak:

Novita Maizir

©2020 SMERU

Untuk catatan kebijakan lainnya, silakan kunjungi www.smeru.or.id.

SMERU adalah sebuah lembaga penelitian independen yang melakukan penelitian dan pengkajian kebijakan publik secara profesional dan proaktif, serta menyediakan informasi akurat dan tepat waktu dengan analisis yang objektif mengenai berbagai masalah sosial-ekonomi dan kemiskinan yang dianggap mendesak dan penting bagi rakyat Indonesia.

Jl. Cikini Raya No. 10A
Jakarta 10330, Indonesia

+6221 3193 6336

+6221 3193 0850 (faks)

smeru@smeru.or.id

www.smeru.or.id

The SMERU Research Institute

@SMERUInstitute

The SMERU Research Institute

The SMERU Research Institute

Temuan, pandangan, dan interpretasi dalam catatan kebijakan ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak berhubungan dengan atau mewakili lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan The SMERU Research Institute.

yaitu masyarakat yang mematuhi protokol kesehatan dalam kegiatan sosial-ekonomi sehari-hari. Kepatuhan masyarakat dapat dibangun melalui upaya penyadaran dan pemberian informasi yang benar mengenai risiko penularan COVID-19 secara terbuka.

Masyarakat dapat bekerja sama dengan pengurus RT/RW, perangkat desa/kelurahan, aktor pada perkumpulan/komunitas masyarakat, serta aktor lain, seperti aparat penegak hukum, terutama dalam hal pengawasan dan penerapan sanksi. Dalam hal ini, praktik baik dari desa adat di Bali dapat menjadi contoh bagaimana penerapan sanksi adat oleh petugas adat dapat membentuk kepatuhan masyarakat yang tinggi (Fillaili, 2020; Tamyis, 2020). Kelompok miskin dan rentan, serta kelompok yang berisiko tinggi terpapar COVID-19 perlu mendapat ruang untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengawasan agar kepentingan dan kebutuhan mereka terpenuhi dan terlindungi.

Rekomendasi 4. Membangun Sistem Pemantauan dan Evaluasi Berkala terhadap Strategi Komunikasi Penanganan Pandemi dan Efektivitasnya

Pemerintah Pusat dan pemda telah memberlakukan berbagai kebijakan, termasuk dalam strategi komunikasi, guna merespons dampak pandemi COVID-19. Sementara itu, tingkat pengetahuan masyarakat yang beragam memengaruhi perilaku dan respons mereka terhadap pandemi ini. Agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan, kebijakan pemerintah dalam strategi komunikasi penanganan pandemi serta pesan yang disampaikan kepada masyarakat harus koheren dan konsisten.

Meski strategi komunikasi untuk memastikan pemahaman yang benar tentang risiko penularan COVID-19 terus dilakukan, pengetahuan masyarakat belum selaras dengan perilaku mereka sehari-hari. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap strategi komunikasi yang diambil pemerintah dan berbagai pihak terkait. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut dapat digunakan untuk melakukan reformulasi strategi komunikasi yang adaptif terhadap situasi pandemi. Pemda, dengan bantuan ornop dan organisasi profesi kesehatan di tiap daerah, perlu memperhatikan efektivitas tiap strategi komunikasi tersebut dan membuat perubahan jika diperlukan. Pemerintah harus memastikan agar kelompok masyarakat miskin dan rentan, serta kelompok yang berisiko tinggi tertular COVID-19 menjadi bagian yang tercakup dalam pemantauan dan evaluasi terhadap strategi komunikasi ini. ■

DAFTAR ACUAN

- Badan Pusat Statistik (2020a) 'Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 Naik Menjadi 9,78 Persen.' Berita Resmi Statistik [daring] <<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>> [22 September 2020].
- Badan Pusat Statistik (2020b) 'Ekonomi Indonesia Triwulan III 2020 Tumbuh 5,05 Persen (Q-to-Q).' Berita Resmi Statistik [daring] <<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1738/ekonomi-indonesia-triwulan-iii-2020-tumbuh-5-05-persen--q-to-q.html>> [22 September 2020].
- Fillaili, Rizki (2020) 'Menimbang Risiko, Membangun Rasa Aman di Tengah Pandemi.' *Feature* [daring] <<https://www.smeru.or.id/id/content/menimbang-risiko-membangun-rasa-aman-di-tengah-pandemi>> [22 September 2020].
- Kurniawan, Asep (2020) 'Ketakpastian Penyelenggaraan PSBB dalam Penanganan COVID-19.' Artikel Blog [daring] <<http://smeru.or.id/id/content/ketakpastian-penyelenggaraan-psbb-dalam-penanganan-covid-19>> [22 September 2020].
- Rahman, Muhammad Adi, Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma, Akhmad Ramadhan Fatah, dan Hafiz Arfyanto (2020) 'Mengantisipasi Potensi Dampak Krisis Akibat Pandemi COVID-19 terhadap Sektor Ketenagakerjaan.' Catatan Kebijakan [daring] <http://smeru.or.id/sites/default/files/publication/pb04_covidnaker_in_0.pdf> [22 September 2020].
- Suryahadi, Asep, Ridho Al Izzati, dan Daniel Suryadarma (2020) 'The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia.' Kertas Kerja [daring] <https://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/wp_covid19impact_draft.pdf> [22 September 2020].
- Tamyis, Ana Rosidha (2020) 'Menengok Adaptasi Masyarakat di Masa Pandemi.' *Feature* [daring] <<http://smeru.or.id/id/content/menengok-adaptasi-masyarakat-di-masa-pandemi>> [22 September 2020].